

**ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR PINJAMAN OLEH PETANI PADA
EKS PROYEK UPP PERKEBUNAN TREE CROPS SMALLHOLDER
DEVELOPMENT PROJECT (TCSDP)**

Syaiful Hadi* dan Ahmad Rifai*

ABSTRACT

Rubber plantation development program pattern Project Implementation Unit (UPP) is Development Smallholder Tree Crops Project (TCSDP) which is a rubber plantation development program to combine the management with regard to technology, production and marketing process financed by Dunia. Penelitian Bank aims to analyze revenue, spending and ability to pay credit ex TCSDP rubber farmers. Results of the study found that the productivity of the former rubber plantation TCSDP almost reached the target KKK 1,500 kg / hectare / tahun. Pendapatan rubber farmers from the former rubber plantation TCSDP has contributed substantially to the income of farm households peserta. Pengeluaran non-food household rubber farmers ex TCSDP two-thirds of food expenditure and relatively prosperous. Farmers ex TCSDP very able to pay the mortgage loan repayment rate kredit. Rendahnya more due to management are not well established

Keywords : rubber farmer, household income, productivity, household expenditure

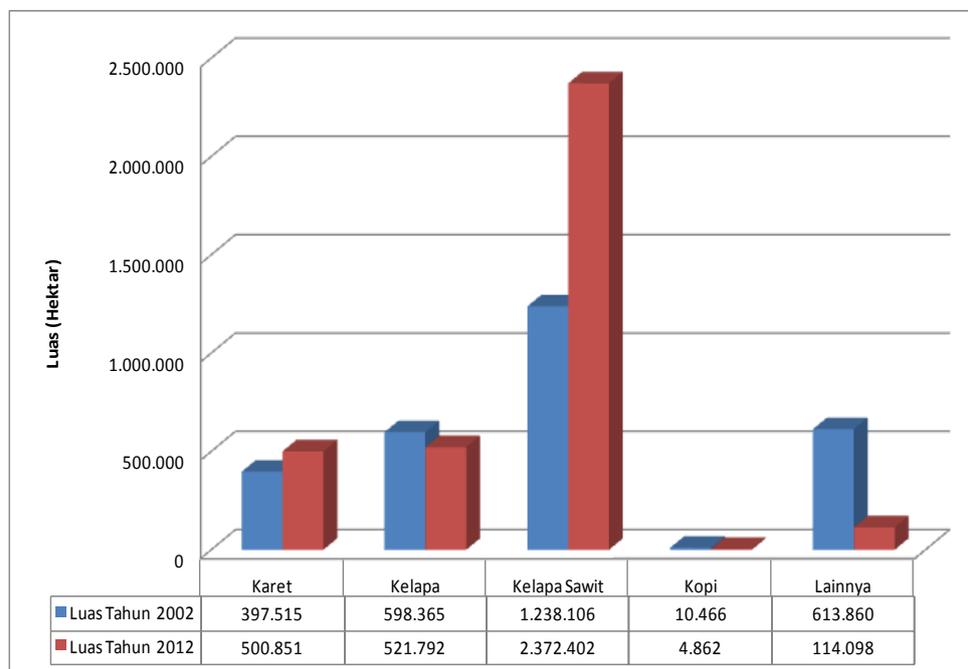
* *Syaiful Hadi dan Ahmad Rifai adalah Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau, Pekanbaru.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran sektor pertanian dalam perekonomian tanpa minyak dan gas di Riau masih dominan dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Kontribusi sektor pertanian dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar 31,60 persen pada perekonomian tanpa minyak dan gas, dan sebesar 16,81 persen pada perekonomian dengan minyak dan gas pada tahun 2012. Peran penting sektor pertanian dalam perekonomian Riau juga ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Pada Februari 2013 proporsi penduduk Riau yang bekerja disektor pertanian mencapai 44,80 persen (BPS, Riau Dalam Angka, 2013). Perkembangan pertanian di Provinsi Riau lebih didominasi oleh sektor perkebunan.

Perkembangan luas tanaman perkebunan di Provinsi Riau selama periode 2002 – 2012 mengalami perkembangan sebesar 12,94 persen. Perkembangan luas areal terbesar adalah tanaman kelapa sawit yaitu sebesar 91,62 persen, diikuti oleh tanaman perkebunan lainnya yaitu sebesar 85,87 persen, karet sebesar 26,00 persen. Luas areal kelapa menurun sebesar 12,80 persen dan kopi menurun sebesar 53,54 persen.

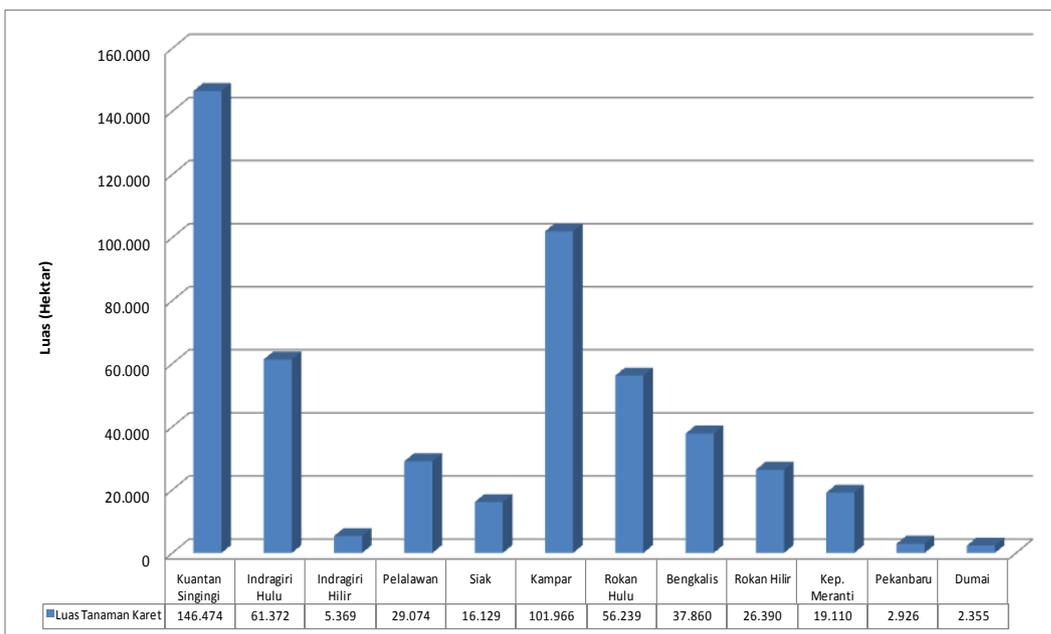


Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2013.

Gambar 1. Perkembangan Luas Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2002 – 2012

Komoditas perkebunan utama yang berkembang di Provinsi Riau adalah kelapa sawit, kelapa, dan karet. Pada tahun 2012, luas areal tanaman karet di Provinsi Riau yang terdiri dari perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan seluas 498.907 hektar, dengan produksi 344.538 ton. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan industri hilir karet. Posisi Provinsi Riau dalam perkaretan nasional sangat potensial, dengan luas areal karet terbesar nomor tiga di Indonesia dengan share 11,30 persen terhadap total luas areal karet Indonesia pada tahun 2012. Sedangkan dari sisi produksi, Provinsi Riau berada pada posisi keempat dengan share sebesar 13,45 persen terhadap produksi karet nasional (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2014).

Pengusahaan tanaman karet di Provinsi Riau pada umumnya adalah perkebunan rakyat, dan hanya sebahagian kecil oleh perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan besar swasta. Beberapa daerah pengembangan karet di Provinsi Riau terkonsentrasi pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (28,99 persen), Kabupaten Kampar (20,18 persen), Kabupaten Indragiri Hulu (12,15 persen), dan Kabupaten Rokan Hulu (11,13 persen). Distribusi luas areal karet di Provinsi Riau menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2013.

Gambar 2. Luas Areal Perkebunan Karet di Riau

Pengembangan karet merupakan salah pengembangan komoditas perkebunan berbasis sumberdaya alam. Hal dikarenakan secara alamiah Riau diberi karunia berupa keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas perkebunan wilayah tropis yang salah satunya adalah perkebunan karet. Tanaman karet (*havea brasiliensis*) adalah tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus. Pohon karet pertama kali tumbuh di Brasil, Amerika Selatan, namun setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham, pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, dan saat ini tanaman karet banyak dikembangkan hingga menjadikan Negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara menjadi produsen karet alam dunia.

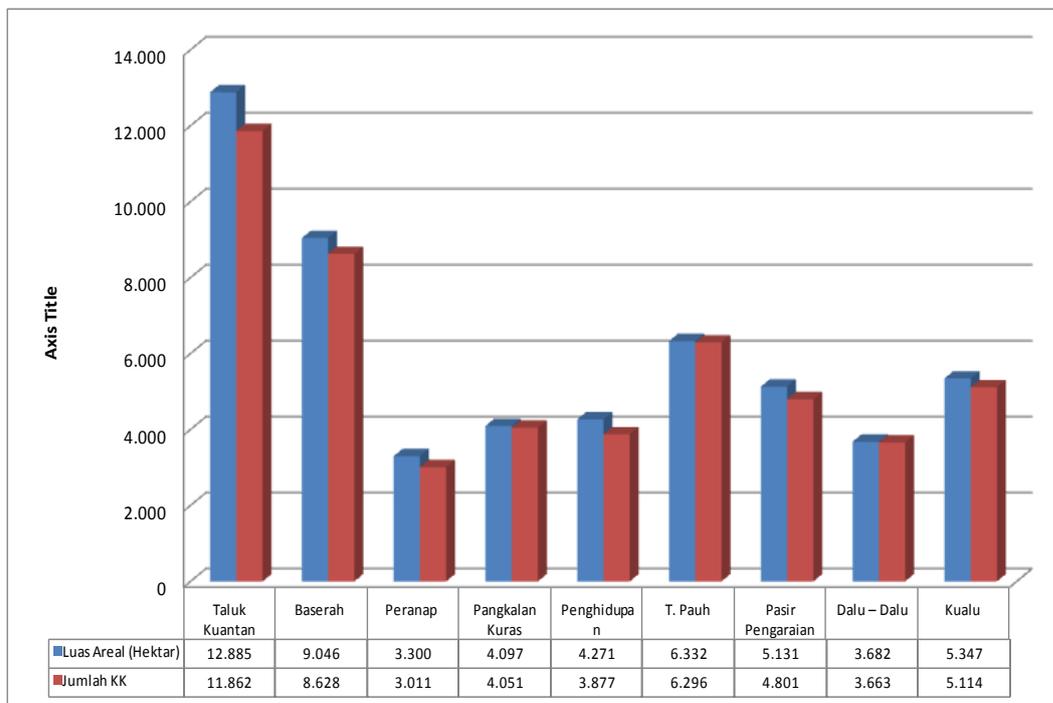
Seiring dengan pengembangan komoditas karet, telah menjadikan tanam perkebunan ini mempunyai kontribusi cukup besar dalam kegiatan ekonomi rakyat dan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian daerah Indonesia. Pola pengembangan perkebunan karet rakyat dimulai sejak tahun 1979 melalui Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) PIR/NES, SRDP, TCSDP, dan lain-lain. Strategi pembangunan (proyek) perkebunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah modernisasi dengan mengadopsi dan menggunakan teknologi diberbagai bidang pertanian.

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 90-an, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pengembangan perkebunan karet melalui proyek Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) *Tree Crop Smallholder Development Project* (TCSDP). Luas areal pengembangan UPP TCSDP di Riau mencapai 54.091 hektar dengan melibatkan sebanyak 53.303 rumah tangga petani. Pengembangan kebun UPP TCSDP tersebar pada beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Riau sehingga menjadi salah satu pendorong pengembangan tanaman perkebunan di Riau. Wilayah pengembangan komoditas perkebunan melalui pengembangan UPP-TCSDP di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 3.

Masa pengembangan perkebunan karet melalui UPP TCSD di Provinsi Riau telah berlangsung cukup lama berkisar antara 18 – 22 tahun. Meski belum melewati usia ekonomis, namun tanaman karet yang ada berada pada posisi produksi yang terus menurun dan bahkan banyak tanaman karet yang dikembangkan melalui pola ini sudah

mulai tua, bahkan rusak sehingga sudah perlu dipersiapkan untuk direplanting. Sesuai tujuan pengembangan pola UPP TCSDP ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga petani dan menjadikan komoditas karet sebagai sumber pendapatan rumah tangga petani. Seiring dengan semakin tua umur dan jumlah tanaman karet mengakibatkan penurunan kemampuan dalam produksi yang juga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan petani. Penurunan pendapatan petani dari komoditas karet berdampak kepada kemampuan petani dalam mencukupi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesejahteraan petani. Disisi lain, petani peserta proyek masih bertanggung hutang yang harus dikembalikan. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian analisis kemampuan petani peserta proyek UPP-TCSDP dalam mengembalikan pinjaman pengembangan kebun yang telah diterima.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2013.

Gambar 3. Daerah Pengembangan Perkebunan melalui UPP-TCSDP di Provinsi Riau

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pemaparan perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Menganalisis pendapatan rumah tangga petani karet eks. TCSDP,
2. Menganalisis pengeluaran rumah tangga petani karet eks. TCSDP,

3. Menganalisis kemampuan membayar kredit oleh petani pesertakaret eks. TCSDP.

Manfaat kajian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan areal karet di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan komoditi perkebunan, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.

II. METODOLOGI

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap petani karet eks. penerima Proyek UPP TCSDP di Provinsi Riau. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2014, melibatkan 6 orang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei. Pada awal rencana penelitian, *Mustistage Area Sampling* digunakan untuk menentukan sampel area (*sampling area*) dan sampel lokasi (*sampling location*). Seluruh wilayah pengembangan TCSDP di Provinsi Riau yaitu Taluk Kuantan, Baserah, Peranap, Pangkalan Kuras, Penghidupan, T. Pauh, Pasir Pengaraian, Dalu-Dalu dan Kualu diambil menjadi sampel area. Setiap sampel area diambil 2 desa representatif sebagai sampel lokasi dengan jumlah responden (*sample intensity*) sebanyak 30 orang petani peserta proyek. Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat berbagai kendala sehingga sampel area yang dapat dilakukan hanya di UPP TCSDP Peranap, Pangkalan Kuras, Penghidupan dan Kualu. Sampel lokasi di UPP TCSDP Peranap meliputi Desa Pauh Ranap, Desa Gumanti dan Desa Semelinang Barat. Sampel lokasi di UPP TCSDP Pangkalan Kuras adalah di Desa Balam Merah, di UPP TCSDP Penghidupan adalah di Desa Bina Baru dan di UPP TCSDP Kualu di Desa Alam Panjang. Pengambilan sampel disetiap sampel lokasi dilakukan secara sengaja (*Purposive Random Sampling*) yaitu petani eks. penerima proyek TCSDP tangan pertama dan tanaman karet proyek tersebut masih dikelola pada saat penelitian dilakukan serta mendapat kerjasama dari pihak terkait.

2.2. Analisis Data

2.2.1. Analisis Usahatani Perkebunan

Analisis usahatani perkebunan dilakukan dengan analisis biaya usahatani perkebunan, dan analisis produktivitas usaha perkebunan yang dilakukan oleh rumah tangga petani eks.TCSDP. Penerimaan usahatani ialah semua nilai produk yang dihasilkan dari suatu usahatani dalam satu periode tertentu. Untuk menghitung penerimaan (pendapatan kotor) digunakan rumus Soekartawi (1995):

$$TR = Y \times P_y \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: TR adalah Total Penerimaan (Rp/tahun), Y adalah produksi yang diperoleh dalam satu tahun (kg/tahun), dan P_y adalah harga produksi yang dihasilkan petani (Rp/kg).

2.2.2. Analisis Pendapatan Bersih (Keuntungan)

Pendapatan bersih usahatani diperoleh dengan mengurangi penerimaan dengan total biaya usahatani, dihitung menggunakan rumus Soekartawi (1995) :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan: π adalah pendapatan bersih usahatani (Rp/tahun), TR adalah total penerimaan (Rp/tahun), dan TC adalah total biaya usahatani yang dikeluarkan (Rp/tahun).

Biaya produksi usahatani karet dihitung dengan menggunakan rumus Soekartawi (1995) :

$$TC = TFC + TVC \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan: TC adalah Total Cost (Biaya total) (Rp/tahun), TFC adalah Total Fixed Cost (biaya tetap total) (Rp/tahun), dan TVC adalah Total Variable Cost (biaya tidak tetap total) (Rp/tahun).

2.2.3. Analisis Struktur Pendapatan dan Pendapatan Rumah Tangga

Struktur Pendapatan merupakan sumber-sumber pendapatan pertanian dan non pertanian dengan sumber pendapatan yang lain. Struktur pendapatan juga dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$Y = A + B \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan: Y adalah Pendapatan rumah tangga (Rp/tahun), A adalah pendapatan dari mata pencaharian pertanian (Rp/tahun), B adalah pendapatan dari mata pencaharian non pertanian (Rp/tahun).

Pendapatan rumah tangga dihitung dengan mengetahui pendapatan utama dan sampingan yang diperoleh seluruh anggota rumah tangga dari berbagai sumber

pendapatan. Pendapatan utama berasal dari pendapatan atau pekerjaan utama petani sampel sebagai petani karet atau komoditi perkebunan dalam proyek TCSDP. Selanjutnya pendapatan sampingan terdiri dari pendapatan selain dari pendapatan usahatani karet, pendapatan istri, anak atau usaha lainnya. Mengukur tingkat pendapatan rumah tangga, digunakan rumus (Widodo, 1990) :

$$Y_{rt} = Y_{i_1} + Y_{i_2} \dots\dots\dots (4)$$

$$Y_{rt} = (A_1) + (B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7)$$

Keterangan: Y_{rt} adalah pendapatan rumah tangga (Rp/tahun), Y_{i_1} adalah pendapatan utama rumah tangga (Rp/tahun), Y_{i_2} adalah pendapatan dari usaha sampingan (Rp/tahun), A_1 adalah pendapatan utama (Pendapatan usahatani karet/kelapa sawit dalam Rp/tahun), dan $B_1- B_7$ adalah sumber pendapatan anggota rumah tangga lain dan komoditi lainnya (Rp/tahun).

2.2.4. Analisis Pengeluaran Rumah Tangga

Untuk mengetahui pengeluaran rumah tangga dapat dilihat dengan mengelompokkan pola pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga selama satu bulan yaitu menghitung pengeluaran selama satu minggu kemudian dikonversikan dalam satu bulan. Indikator yang digunakan BPS tahun 2011 yaitu pengeluaran pangan terdiri dari bahan pokok/padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih. Pengeluaran non pangan yaitu perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara.

2.2.5. Analisis Kemampuan Bayar

Untuk menghitung kemampuan bayar berdasarkan perhitungan pendapatan bersih petani karet, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi_1 = TR - TC \dots\dots\dots (5)$$

$$\pi_2 = \pi_1 - \text{Rata-rata Pinjaman/kredit Petani}$$

$$\text{Kemampuan Bayar} = \pi_2 - \text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}$$

Keterangan: π_1 adalah pendapatan usahatani (Rp/tahun), TR adalah total penerimaan (Rp/tahun), TC adalah total cost/biaya (Rp/tahun), π_2 adalah selisih pendapatan usahatani karet dengan rata-rata pinjaman kredit (Rp/tahun)
 Bila nilai kemampuan bayar \geq Rp. 0,- maka mampu

Bila nilai kemampuan bayar < Rp. 0,- maka tidak mampu

Untuk memperoleh kemampuan pembayaran kredit dapat dilakukan analisis dengan Metode Pertimbangan (*Judgemental Credit Analysis*), untuk mengukur kemampuan debitur mencicil kredit yang dipinjam, dapat diukur dengan jalan membandingkan jumlah penghasilan tetap mereka dengan jumlah kewajiban keuangan tiap bulan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DIR (Debt to Income Ratio)} = \frac{\text{pengeluaran tetap/bulan}}{\text{pendapatan tetap/bulan}} \dots\dots\dots (6)$$

Analisis kemampuan pembayaran pinjaman juga dapat dilakukan dengan analisis kemampuan membayar (*affordability assessment*), dengan rumus:

$$\text{AA} = \frac{\text{Total Pendapatan/bulan}}{\text{Cicilan Hutang/bulan}} \dots\dots\dots (7)$$

Kemudian ratio kemampuan pembayaran pinjaman dapat dianalisis dengan Debt Service Ratio (DSR) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DSR} = \frac{\text{total pembayaran pinjaman}}{\text{total pendapatan}} \text{ atau } \frac{\text{angsuran bulanan}}{\text{penghasilan/bulan}} \dots\dots\dots (8)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki merupakan porsi terbesar yaitu 79,52% dari total responden (166 responden) dan porsi responden perempuan sebesar 20,48% dari total responden. Hal ini terkait erat dengan budaya masyarakat di Kuantan dan Kampar (Kabupaten Kampar dan Pelalawan) bahwa pengelolaan kebun karet/kelapa sawit utamanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan disawah.

Responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa porsi terbesar berada pada kelompok umur 45 – 54 tahun yaitu sebesar 43,37%, diikuti kelompok umur 35 – 44

tahun dan kelompok umur 44 – 64 tahun yang porsi masing-masingnya sebesar 29,52% dan 21,69%. Ketiga kelompok umur ini terkategori umur produktif. Porsi kelompok umur tidak produktif (> 64 tahun) sebesar 5,42% dari total responden. Arsyad (2010) dan Mulyadi (2010) menyatakan bahwa umur produktif petani antara 15 – 64 tahun dan tidak produktif berada pada kisaran umur 0 – 14 tahun dan lebih besar dari 64 tahun. Petani yang berada pada usia produktif mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dan lebih giat mengadopsi teknologi dan informasi dibandingkan dengan petani yang berumur tua. Tetapi petani yang berumur tua umumnya mempunyai pengalaman kerja yang banyak sehingga lebih matang dalam mengelola usahatani dan lebih berhati-hati dalam menghadapi teknologi dan informasi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berkembang pola berpikirnya sehingga dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu dengan baik termasuk keputusan dalam kegiatan usaha. Tingkat pendidikan responden terkategori rendah yang terlihat dari porsi terbesar tingkat pendidikan responden adalah tamat SD yaitu sebesar 29,52% diikuti tamat SMP (27,71%), bahkan responden yang tidak menamatkan SD dan tidak sekolah masing-masingnya sebesar 10,84% dan 4,81%. Responden yang menamatkan SMA dan Perguruan Tinggi masing-masingnya sebesar 17,47% dan 9,64%.

Jumlah anggota keluarga adalah seluruh anggota keluarga petani responden termasuk yang masih sekolah dan belum bekerja. Semakin besar jumlah anggota keluarga maka akan berpengaruh terhadap pendapatan/pengeluaran per kapita dalam keluarga petani tersebut. Rata-rata jumlah anggota keluarga 3 – 4 orang menempati porsi terbesar yaitu 54,84% dari total responden (166 responden), diikuti dengan jumlah anggota keluarga 1 – 2 orang dan 5 – 6 orang yang masing-masing porsinya sebesar 34,34% dan 10,84%. Jumlah anggota keluarga petani responden relatif ideal yaitu sekitar 4 orang yang terdiri ayah dan ibu serta 2 orang anak.

Petani karet eks. TCSDP umumnya merupakan petani yang mengusahakan tanaman karet sebelum menjadi peserta program. Hal ini terlihat dari pengalaman usahatani karet yang melebihi umur tanaman karet eks. TCSDP. Pengalaman usahatani karet antara 15 – 24 tahun menempati porsi terbesar yaitu sebesar 50,60%, diikuti pengalaman antara 25 – 34 tahun, 35 – 44 tahun dan 45 – 54 tahun yang masing-masing porsinya sebesar 31,33%, 15,06% dan 3,01%. Relatif besarnya porsi pengalaman

usahatani karet 15 – 24 tahun lebih disebabkan pengusahakan dilakukan oleh anak peserta program.

Tabel 1. Kepemilikan Kebun Petani Responden Menurut Desa

No.	Desa	Kepemilikan Kebun (Hektar)									
		Karet Eks TCSDP	Karet Non TCSDP					Kebun Kelapa Sawit			
		1	0	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	0	1 - 2	3 - 4	5 - 6
1	Pauh Ranap	30	13	10	6	1	-	21	8	1	-
2	Gumanti	30	6	24	-	-	-	26	3	1	-
3	Semelinang Darat	30	5	5	4	9	7	20	6	2	2
4	Balam Merah	30	9	16	3	1	1				
5	Bina Baru	30	7	19	4	-	-	19	8	2	1
6	Alam Panjang	16	4	11	1	-	-	14	2	-	-
	Jumlah	166	44	85	18	11	8	100	27	6	3
	Persentase (%)	100,00	26,51	51,20	10,84	6,63	4,82	60,24	16,27	3,61	1,81

Luas kepemilikan kebun karet eks TCSDP responden, 100% seluas 1 hektar. Umumnya. Meski dalam daftar peserta TCSDP dijumpai seluas 2 hektar dalam jumlah sangat sedikit sekali, namun dilapangan tidak ditemukan. Disamping kebun karet eks. TCSDP, sebanyak 122 responden atau 73,49% dari total petani responden memiliki kebun karet swadaya yang realtif lebih luas dari kebun karet eks. TCSDP. Porsi terbesar luas areal karet swadaya yang dimiliki responden adalah 1 - 2 hektar yaitu sebesar 51,20%, diikuti tidak memiliki tanaman karet, memiliki tanaman karet swadaya 3 – 4 hektar, 5 – 6 hektar dan 7 – 8 hektar yang masing-masing porsinya sebesar 26,51%, 10,84%, 6,63% dan 4,82%. Disamping kebun karet eks.TCSDP dan kebun karet swadaya, sebanyak 36 petani responden atau 21,69% dari total responden memiliki juga kebun kelapa sawit. Petani responden yang memiliki kebun kelapa sawit seluas 1 – hektar sebesar 16,27%, diikuti kebun kelapa sawit seluas 3 – 4 hektar (3,61%) dan seluas 5 – 6 hektar (1,81%).

3.2. Analisis Usahatani Karet

3.2.1. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi ojol yang meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan volume produksi ojol yang dihasilkan seperti pupuk, herbisida, cuka getah dan tenaga kerja. Biaya tetap merupakan biaya yang penggunaannya tidak berubah dengan turun naiknya volume produksi ojol, seperti penyusutan alat (parang dan hand sprayer). Besaran biaya variabel dan biaya tetap kebun karet eks TCSDP dan non TCSDP ditunjukkan pada Tabel 2. Rata-rata total

biaya produksi kebun karet eks TCSDP sebesar Rp 10.821.216/hektar/tahun , dimana sebesar 99,69% merupakan biaya variabel dan 0,31% merupakan biaya tetap. Rata-rata biaya produksi pada kebun karet non TCSDP relatif lebih besar yaitu Rp18.714.214/hektar/tahun yang terdiri dari 99,69% merupakan biaya variabel dan 0,31% merupakan biaya tetap. Lebih tingginya biaya produksi pada kebun non TCSDP terletak pada penggunaan pupuk, dan herbisida serta tenaga kerja.

Tabel 2. Biaya Produksi Tanaman Karet Eks. TCSDP dan Non TCSDP

No.	Desa	Biaya Produksi (Rp/Hektar/Tahun)					
		Kebun Karet Eks. TCSDP			Kebun Karet Non TCSDP		
		Variabel	Tetap	Jumlah	Variabel	Tetap	Jumlah
1	Pauh Ranap	9.695.517	45.963	9.741.480	15.984.167	67.517	16.051.684
2	Gumanti	13.386.398	41.022	13.427.420	17.363.669	43.500	17.407.169
3	Semelinang Darat	9.119.159	18.836	9.137.995	19.951.771	79.210	20.030.981
4	Balam Merah	12.240.943	42.249	12.283.192	23.304.074	62.995	23.367.069
5	Bina Baru	11.153.354	29.024	11.182.378	24.047.891	65.166	24.113.057
6	Alam Panjang	9.129.719	25.113	9.154.832	11.280.294	35.207	11.315.501
	Rata-rata	10.787.515	33.701	10.821.216	18.655.311	58.933	18.714.244
	Persentase (%)	99,69	0,31	100,00	99,69	0,31	100,00

3.2.2. Produksi dan Produktivitas

Peningkatan produksi dan produktivitas karet rakyat merupakan salah satu tujuan utama proyek TCSDP dengan target produktivitas sebesar 1.500 kg KKK/hektar/tahun. Rata-rata produktivitas kebun eks. TCSDP petani responden sebesar 2,76 ton ojol/hektar/ tahun, lebih rendah dibanding rata-rata produktivitas kebun non TCSDP yaitu sebesar 3,09 ton ojol/hektar per tahun. Produktivitas kebun eks TCSDP ini lebih rendah dibandingkan rata-rata produktivitas kebun NES II Bukit Selasih. Hadi (1996) menyatakan bahwa produktivitas lump kebun plasma NES II di Indragiri Hulu sebesar 2.974 kg Lump Kebun /hektar/tahun atau setara dengan 1.487,34 kg KKK/hektar/tahun (KKK lum kebun mutu II 50%). Produktivitas yang dihasilkan oleh petani plasma NES II ini hampir mencapai target produktivitas 1.500 kg KKK/hektar/ tahun.

Produktivitas kebun karet eks TCSDP sebesar 2,76 ton atau 2.760 kg ojol/hektar/ tahun atau setara dengan 1.380 kg KKK/hektar/tahun. Rata-rata produktivitas kebun eks TCSDP relatif rendah dari target proyek 1.500 KKK/hektar/tahun, dikarenakan oleh beberapa sebab, antara lain: (i) relatif tidak dilakukan pemupukan, (ii) pengendalian gulma yang rendah, (iii) umur tanaman memasuki usia produksi menurun dan (iv) populasi pohon karet yang hanya sekitar 2/3

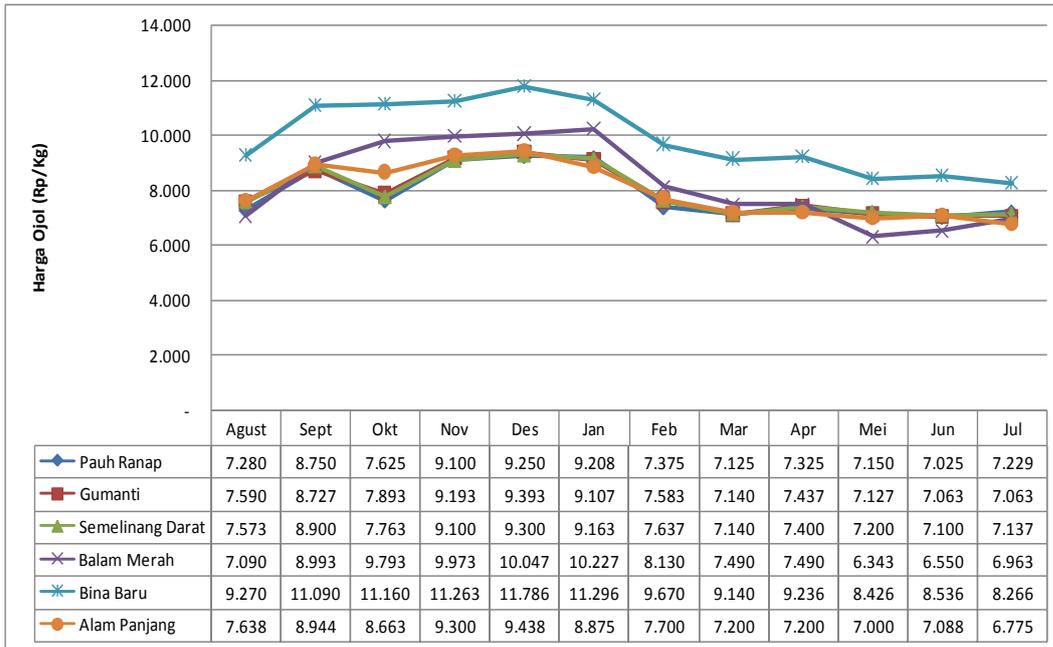
dari norma. Produktivitas kebun karet non TCSDP justru lebih tinggi dibanding produktivitas kebun karet eks TCSDP dan bahkan diatas target kebun SRDP dan TCSDP yaitu sebesar 3.090 kg ojol/hektar/tahun atau setara 1.545 kg KKK/hektar/tahun. Lebih tingginya kebun non TCSDP milik responden meski tidak menggunakan bibit unggul karena beberapa hal, antara lain: (i) umur tanaman berada pada usia produksi dan produktivitas tertinggi, (ii) pemupukan yang lebih baik dan (iii) populasi tanaman karet yang lebih tinggi jumlahnya.

Tabel 3. Produksi dan Produktivitas Kebun Karet Petani Responden

No.	Desa	Produksi (Ton Ojol/Total Area Sampel/Tahun)		Produktivitas (Ton Ojol/Ha/Tahun)	
		Karet Eks. TCSDP	Karet Non TCSDP	Karet Eks. TCSDP	Karet Non TCSDP
1	Pauh Ranap	87,71	121,44	2,92	3,11
2	Gumanti	97,08	114,99	3,24	4,79
3	Semelinang Darat	83,79	473,24	2,79	3,56
4	Balam Merah	80,29	91,38	2,68	1,79
5	Bina Baru	71,70	94,76	2,39	2,46
6	Alam Panjang	40,99	53,69	2,56	2,83
	Rata-rata	76,93	158,25	2,76	3,09

3.2.3. Harga Ojol

Harga ojol ditingkat petani sangat ditentukan oleh kadar air, kebersihan dan jarak antara desa dengan pabrik. Harga ojol tertinggi dijumpai di Desa Bina Baru, yang rata-rata lebih tinggi dibanding desa lainnya sekitar Rp 1200 – 1500 per kilogram. Lebih tingginya harga yang diterima oleh petani karet di Desa Bina baru dikarenakan ojol yang relatif bersih, lebih kering atau kadar karet keringnya (KKK) yang lebih tinggi dan didukung letak desa yang lebih strategis sehingga biaya transportasi relatif rendah. Selama periode Agustus 2013 – Juli 2014, harga jual ojol petani berfluktuatif menurun dengan rata-rata penurunan harga sebesar 0,56%/bulan.



Gambar 3. Harga Jual Ojol di Tingkat Petani Selama Periode Agustus 2013 – Juli 2014

3.2.4. Pendapatan Usahatani Karet

Rata-rata pendapatan kotor usahatani karet eks. TCSDP seluas 1 hektar dengan produktivitas sebesar 2,76 ton/tahun dengan harga sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, sebesar Rp 21.272.639 per tahun. Rata-rata pendapatan usahatani karet eks TCSDP ini relatif lebih rendah dibanding pendapatan usahatani karet non TCSDP yaitu sebesar Rp 25.229.596 per tahun. Lebih tingginya pendapatan kotor pada kebun karet non TCSDP karena luasannya relatif lebih luas (2,05 hektar) dengan produktivitas yang lebih tinggi (3,09 ton/tahun).

Tabel 4. Rata-Rata Pendapatan Usahatani Karet Eks TCSDP dan Non TCSDP Responden

No.	Desa	Rata-Rata Pendapatan Usahatani Karet (Rp/Tahun)							
		Kebun Karet Eks. TCSDP				Kebun Karet Non TCSDP			
		Pendapatan Kotor	Keuntungan Bersih	Biaya Tenaga Kerja	Pendapatan Kerja Keluarga	Pendapatan Kotor	Keuntungan Bersih	Biaya Tenaga Kerja	Pendapatan Kerja Keluarga
1	Pauh Ranap	22.293.030	12.607.551	9.147.211	21.754.762	23.727.294	16.998.568	5.777.740	22.776.308
2	Gumanti	25.239.177	11.811.756	10.291.400	22.103.156	34.584.054	20.058.890	13.164.906	33.223.796
3	Semelinang Darat	15.604.060	6.466.065	8.777.225	15.243.290	15.982.663	12.195.815	3.491.681	15.687.496
4	Balam Merah	22.235.331	9.952.139	11.665.443	21.617.582	33.907.919	10.584.684	20.639.554	31.224.238
5	Bina Baru	23.811.740	11.781.653	11.558.929	23.340.582	24.602.898	17.157.928	11.173.891	23.833.239
6	Alam Panjang	18.452.496	9.297.664	8.376.722	17.674.386	18.572.750	7.257.249	6.567.592	13.824.841
	Rata-rata	21.272.639	10.319.471	9.969.488	20.288.960	25.229.596	14.042.189	10.135.894	23.428.320

Selisih antara pendapatan kotor dengan biaya produksi merupakan keuntungan bersih. Pendapatan bersih (keuntungan) pada kebun eks TCSDP sebesar Rp 10.319.471 per tahun dengan biaya tenaga kerja dalam keluarga sebesar Rp 9.969.488, sehingga pendapatan kerja keluarga dari kebun eks TCSDP sebesar Rp 20.288.960 per tahun.

Pendapatan (keuntungan)bersih yang diterima dari kebun karet non TCSDP sebesar Rp 14.042.189 per tahun dengan biaya tenaga kerja dalam keluarga Rp 10.135.894 per tahun sehingga pendapatan kerja keluarga sebesar Rp 23.428.320 per tahun.

3.3. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga petani karet eks TCSDP meliputi seluruh pendapat anggota rumah tangga yang beraal dari berbagai sumber yang terdiri dari pendapatan usaha pertanian (karet TCSDP, karet non TCSDP, kebun kelapa sawit dan lainnya) dan pendapatan dari non pertanian (PNS/Swasta, dagangan dan lainnya). Rata-rata total pendapatan rumah tangga petani karet eks TCSDP selama setahun sebesar Rp 54.235.729. Total pendapatan rumah tangga eks TCSDP ini sebagian besar (84,36%) berasal dari usahatani perkebunan, hanya sebagian kecil dari usaha non pertanian (15,64%).

Tabel 5. Rata-Rata Pendapatan Usahatani dan Non Pertanian Rumah Tangga

No.	Desa	Rata-Rata Pendapatan Usaha Pertanian (Rp/RT/Tahun)				Rata-Rata Pendapatan Usaha Non Pertanian (Rp/RT/Tahun)				Jumlah
		Kebun Karet Eks TCSDP	Kebun Karet Non TCSDP	Kebun Sawit & Lainnya	Jumlah	PNS/Swasta	Dagang	Lainnya	Jumlah	
1	Pauh Ranap	21.754.762	12.906.575	1.480.000	36.141.337	3.200.000	920.000	3.253.333	7.373.333	43.514.670
2	Gumanti	22.103.156	26.579.037	9.360.000	58.042.193	1.706.667	1.600.000	2.533.333	5.840.000	63.882.193
3	Semelinang Darat	15.243.290	14.118.746	6.120.000	35.482.036	1.885.714	4.280.000	10.880.000	17.045.714	52.527.751
4	Balam Merah	21.617.582	21.856.967	9.214.286	52.688.834	1.200.000	4.350.000	240.000	5.790.000	58.478.834
5	Bina Baru	23.340.582	19.066.591	9.250.000	51.657.173	1.154.286	6.736.000	1.480.000	9.370.286	61.027.459
6	Alam Panjang	17.674.386	21.634.082	1.200.000	40.508.468	3.150.000	1.500.000	825.000	5.475.000	45.983.468
	Rata-rata	20.288.960	19.360.333	6.104.048	45.753.340	2.049.444	3.231.000	3.201.944	8.482.389	54.235.729

Rata-rata jumlah anggota keluarga petani karet eks TCSDP sebanyak 3,77 jiwa per rumah tangga. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi antara jumlah pendapatan rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga. Rata-rata pendapatan per kapita per bulan anggota rumah tangga petani eks TCSDP sebesar Rp 1.195.999.

Tabel 6. Rata-Rata Pendapatan Per Kapita/Bulan Rumah Tangga Petani Karet Eks TCSDP

No.	Desa	Pendapatan (Rp/Kapita/Bulan)		Jumlah
		Pertanian	Non Pertanian	
1	Pauh Ranap	772.251	157.550	929.801
2	Gumanti	1.249.832	125.754	1.375.586
3	Semelinang Darat	799.145	383.912	1.183.057
4	Balam Merah	1.155.457	126.974	1.282.431
5	Bina Baru	1.076.191	195.214	1.271.405
6	Alam Panjang	998.729	134.985	1.133.715
	Rata-rata	1.008.601	187.398	1.195.999

3.4. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga petani karet eks TCSDP merupakan semua pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tersebut baik pengeluaran pangan maupun pengeluaran non pangan. Pengeluaran

pangan meliputi padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur dan susu, minyak/lemak, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, makanan jadi, konsumsi kainnya dan rokok). Pengeluaran non pangan meliputi sandang, papan, pendidikan, kesehatan, bahan bakar dan lainnya.

Tabel 7. Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Petani Karet Eks TCSDP

No.	Desa	Pengeluaran (Rp/RT/Tahun)		Jumlah
		Pangan	Non Pangan	
1	Pauh Ranap	10.417.358	14.143.626	24.560.984
2	Gumanti	10.379.600	14.843.600	25.223.200
3	Semelinang Darat	11.471.378	23.271.085	34.742.463
4	Balam Merah	12.466.588	28.748.900	41.215.488
5	Bina Baru	11.154.914	15.786.795	26.941.709
6	Alam Panjang	15.777.960	23.977.500	39.755.460
Rata-rata		11.944.633	20.128.584	32.073.217

Rata-rata pengeluaran rumah tangga petani karet eks TCSDP sebesar Rp 11.944.633 per tahun atau 37,24% dari total pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran non pangan lebih besar dibanding pengeluaran pangan yaitu sebesar Rp 20.128.584 per tahun atau 62,76% dari total pengeluaran rumah tangga petani karet eks TCSDP. Pengeluaran non pangan yang lebih tinggi dibanding pengeluaran pangan mengindikasikan bahwa rumah tangga petani karet eks TCSDP tergolong sejahtera.

Apabila pengeluaran rumah tangga petani karet eks TCSDP ini diukur per kapitanya memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga petani karet eks TCSDP sebesar Rp 715.955 per bulan. Rataan pengeluaran per kapita perbulan anggota rumah tangga petani karet eks TCSDP telah jauh melampaui garis kemiskinan Provinsi Riau. BPS Provinsi Riau (2014) menyatakan bahwa garis kemiskina Provinsi Riau untuk wilayah pedesaan sebesar Rp 374.466/kapita/bulan.

Tabel 8. Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Per kapita Rumah Tangga Petani Karet Eks. TCSDP

No.	Desa	Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)		Jumlah
		Pangan	Non Pangan	
1	Pauh Ranap	222.593	302.214	524.807
2	Gumanti	223.506	319.630	543.135
3	Semelinang Darat	258.364	524.124	782.488
4	Balam Merah	273.390	630.458	903.848
5	Bina Baru	232.394	328.892	561.286
6	Alam Panjang	389.003	591.161	980.164
Rata-rata		266.542	449.413	715.955

3.5. Kemampuan Membayar Kredit Kebun TCSDP

Saat ini, umur tanaman karet eks TCSDP telah berumur 18 – 22 tahun dan berada pada tahapan produksi semakin menurun, namun pembayaran kredit oleh petani peserta masih menjadi kendala dengan tunggakan sekitar 79,35%. Permasalahan tunggakan kredit petani eks TCSDP ini telah diselesaikan melalui Peraturan menteri keuangan Nomor: 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian piutang negara pada petani peserta eks proyek perusahaan inti rakyat dan ek unit pelaksana perkebunan dan Permentan Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman pelaksanaan pengendalian dan penyelesaian piutang negara pada petani proyek perusahaan inti rakyat perkebunan dan unit pelaksana proyek perkebun dilakukan dengan ‘pemutihan’. Meski penyelesaian telah dikeluarkan Pemerintah perlu ditelaah apakah kemampuan petani eks TCSDP untuk melunasi kredit lemah atau karena sebab lain.

Analisis kemampuan membayar kredit proyek TCSDP petani eks TCSDP dapat dihitung berdasarkan perhitungan pendapatan bersih. Hasil perhitungan mendapatkan bahwa rata-rata nilai kemampuan membayar petani Rp 13.381.443, jauh lebih besar dari Rp 0 sehingga dapat dikatakan bahwa petani peserta mempunyai kemampuan membayar kredit TCSDP.

Tabel 9. Kemampuan Bayar, Debt to Income Ratio, Affordability Assessment dan Debt Service Ratio

No.	Desa	Kemampuan Bayar (Phi2)	DIR	AA	DSR
1	Pauh Ranap	11.299.884,54	0,56	155,15	0,01
2	Gumanti	32.528.630,48	0,39	220,01	0,00
3	Semelinang Darat	433.439,32	0,66	171,58	0,01
4	Balam Merah	11.173.666,82	0,70	195,14	0,01
5	Bina Baru	24.421.442,98	0,44	207,56	0,00
6	Alam Panjang	431.598,01	0,86	143,07	0,01
Rata-rata		13.381.443,69	0,59	181,59	0,01

Dianalisis dari debt to income ratio (DIR) yang merupakan ratio antara pengeluaran tetap per bulan terhadap pendapatan tetap per bulan menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 0,59, jauh dibawah 1,0. Hal ini menggambarkan bahwa petani mempunyai kemampuan mencicil kredit TCSDP karena penghasilan tetap jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran tetap per bulan.

Kemampuan membayar kredit TCSDP oleh petani peserta melalui analisis *Affordability Assessment (AA)* yang merupakan rasio total pendapatan perbulan dengan

cicilan hutang per bulan, rata-rata nilai AA sebesar 181,59. Nilai AA sebesar 181,59 ini menggambarkan bahwa kemampuan membayar kredit TCSDP per bulan yang rata-ratanya Rp 24.890 per bulan sebesar 181,59 kali atau besaran total pendapatan/bulan 181,59 kali lebih tinggi dibanding cicilan hutang TCSDP per bulannya.

Bila kemampuan membayar kredit TCSDP petani menggunakan *Debt Service Ratio (DSR)* yang merupakan rasio antara total pembayaran pinjaman terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa rata-rata nilai DSR sebesar 0,01. Rata-rata nilai DSR sebesar 0,01 ini menunjukkan bahwa petani mampu membayar kredit dimana total kredit yang dibayar hanya senilai 1% dari total pendapatan per tahun.

Analisis kemampuan membayar kredit kebun TCSDP menggunakan 4 alat analisis memperlihatkan bahwa petani peserta proyek TCSDP lebih dari mampu untuk membayar cicilan kredit. Permasalahan macetnya pembayaran kredit oleh petani peserta lebih disebabkan karena lemahnya manajemen pengelolaan yang tidak mapan. Hal ini diperberat dengan memasuki era otonomi daerah tahun 1999/2000, dimana petugas-petugas dirjen perkebunan “berserakan” dan menjadi pegawai daerah. Tanggung jawab pembinaan terhadap petani peserta TCSDP tidak lagi mendapat perhatian oleh Dinas Perkebunan di Kabupaten pemekaran dan bahkan data/informasi peserta relatif tidak diketahui lagi. Petani peserta ‘kebingungan’ untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya dan Dinas Perkebunan tidak menerima pembayaran. Pada akhir tahun 2104, tidak kurang dari 16.000 sertifikat kebun masih berada di Dinas Perkebunan Kuantan Singingi dan “kebingungan” hendak diapakan sertifikat tersebut.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Produktivitas kebun karet eks TCSDP hampir mencapai target 1.500 kg KKK/hektar/ tahun.
2. Pendapatan petani karet dari kebun karet eks TCSDP telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga petani peserta.
3. Pengeluaran non pangan rumah tangga petani karet eks TCSDP dua per tiga dari pengeluaran pangan dan tergolong sejahtera.
4. Petani karet eks TCSDP sangat mampu untuk membayar cicilan kredit.

5. Rendahnya tingkat pengembalian kredit lebih disebabkan manajemen pengelolaan yang tidak mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2). <http://www.bps.go.id>. Diakses 10 Februari 2015.
- _____. 2013. *Riau dalam Angka Tahun 2013*. BPS Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2014. *Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014*. Pekanbaru.
- Hadi, Syaiful. 1996. *Respon Penawaran Karet Alam Riau dan kelembagaan Pengusahaannya di Perkebunan Rakyat*. Thesis Magister IPB Bogor. Bogor.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Widodo, S. T. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian*. Kanisius. Yogyakarta.